

ABSTRAK

Praktik thrifting atau perdagangan pakaian bekas impor semakin berkembang di Indonesia meskipun telah dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Peningkatan impor pakaian bekas berdampak negatif bagi industri garmen dalam negeri, berpotensi menyebabkan PHK massal, dan menimbulkan risiko kesehatan akibat kontaminasi bakteri. Meski ada larangan tersebut, masih banyak pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian bekas secara ilegal, sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik thrifting di Kabupaten Jember. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap praktik thrifting di Kabupaten Jember. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode penelitian menggunakan pendekatan hukum (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Penegakan hukum terhadap praktik thrifting di Kabupaten Jember dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pengawas dan pengendali. Selain itu, Satpol PP juga ikut serta dalam mengawal pedagang pakaian bekas di trotoar agar tidak mengganggu ketertiban umum.

Kata kunci: penegakan hukum; penghematan; dan Kabupaten Jember.



ABSTRACT

The practice of thrifting or trading in imported used clothing is growing in Indonesia even though it has been prohibited based on the Regulation of the Minister of Trade Number 40 of 2022 and Law No. 7 of 2014 on Trade. The increase in imports of used clothing has a negative impact on the domestic garment industry, has the potential to cause mass layoffs, and poses health risks due to bacterial contamination. Despite the prohibition, many business actors still trade used clothing illegally, so stricter law enforcement is needed against thrifting practices in Jember Regency. The purpose of this study was to determine the law enforcement against thrifting practices in Jember Regency. The type of research used is normative legal research with research methods using a statutory approach (Statute Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). Law enforcement against thrifting practices in Jember Regency is carried out by the Indonesian National Police in collaboration with the Department of Industry and Trade as supervisors and controllers. In addition, Satpol PP also participates in controlling used clothing traders on the sidewalks so as not to disturb public order.

Keywords: law enforcement; thrifting; and Jember Regency.

